

**LAPORAN KINERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
SURABAYA RUNGKUT  
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I**

## PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Rungkut ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2024, dan Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2024. Komponen Laporan Kinerja ini didasarkan atas Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target yang telah ditetapkan dan Realisasi yang tercapai selama Tahun 2024 yang terdapat dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaan tugas, dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance* serta dimaksudkan sebagai sarana mengomunikasikan capaian kinerja KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam satu tahun anggaran.

Surabaya, 30 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Dahlia



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah Pendirian**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KPP Pratama Surabaya Rungkut mulai beroperasi pada tanggal 13 November 2001.

KPP Pratama Surabaya Rungkut merupakan pecahan dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan wilayah kerja seluas 9.232 hektar. Wilayah kerja tersebut terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar, dan Kecamatan Tenggiling Mejoyo. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Surabaya Rungkut memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

#### **Visi:**

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

#### **Misi:**

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### **B. Nilai-Nilai Organisasi**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dibentuk, KPP Pratama Surabaya Rungkut berpedoman kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2012 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai tersebut antara lain:

a. Integritas

Nilai ini diwujudkan dengan perilaku berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Nilai ini diwujudkan dengan perilaku bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Nilai ini diwujudkan dengan perilaku membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Nilai ini diwujudkan dengan perilaku memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Nilai ini diwujudkan dengan perilaku senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

### **C. Wilayah Kerja**

Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut meliputi 14 (empat belas) kelurahan yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan Gunung Anyar dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rungkut

Meliputi wilayah: Kelurahan Kalirungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Rungkut Kidul, dan Kelurahan Medokan Ayu.

2. Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Meliputi wilayah: Kelurahan Panjang Jiwo, Kelurahan Kutisari, Kelurahan Kendangsari, Kelurahan Tenggilis Mejoyo

3. Kecamatan Gunung Anyar

Meliputi wilayah: Kelurahan Rungkut Menanggal, Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Tambak

#### D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPP Pratama Surabaya Rungkut sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 96 Pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1  
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Proporsi
1	Pria (Laki-Laki)	46	48%
2	Wanita (Perempuan)	50	52%
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Tabel 1 menunjukkan bahwa komposisi pegawai KPP Pratama Surabaya Rungkut lebih dominan berjenis kelamin Wanita/Perempuan dengan jumlah sebanyak 50 pegawai atau sebesar 52% dari total 96 pegawai. Selain berdasarkan jenis kelamin, pegawai di KPP Pratama Surabaya Rungkut juga dapat dikelompokkan berdasarkan jabatan dan juga usia.

Tabel 2  
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Pegawai	Komposisi
1	20-29 Tahun	21	22%
2	30-39 Tahun	30	31%
3	40-49 Tahun	28	29%
4	≥ 50 Tahun	17	18%
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Tabel 2 menunjukkan bahwa komposisi jumlah pegawai terbanyak berada pada rentang usia produktif antara 30-39 Tahun dengan komposisi sebanyak 31%. Dengan jumlah pegawai yang berada dalam rentang usia produktif (20 Tahun sampai 49 Tahun) lebih dominan, maka diharapkan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam terus meningkatkan produktifitas kinerja dalam mencapai upaya mencapai target.

Tabel 3  
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Proporsi
1	Kepala Kantor	1	1%
2	Pejabat Eselon IV dan Supervisor	11	11%
3	Account Representative	34	35%
4	Fungsional Pemeriksa	11	11%
5	Penyuluh	4	4%
6	Asisten Penyuluh	2	2%
7	Asisten Penilai	1	1%
8	Jurusita	2	2%
9	Pelaksana	30	31%
<b>Total</b>		<b>96</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Tabel 3 menunjukkan bahwa komposisi pegawai terbanyak berdasarkan jabatan adalah Account Representative sebanyak 34 orang pegawai yang terbagi ke dalam 6 Seksi Pengawasan atau sebesar 35% dari total pegawai. Di urutan kedua ada jabatan pelaksana dengan jumlah sebanyak 30 orang pegawai (termasuk sekretaris dan bendahara).

#### **E. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai unit vertikal dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-75/PJ/2020 mempunyai tugas sebagai berikut:

*“Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-75/PJ/2020, KPP Pratama Rungkut menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis. penjabaran. dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan. edukasi. pendaftaran. dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak. objek pajak. dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan. pemeriksaan. penilaian. dan penagihan pajak;
- i. pendataan. pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak. dan pengenaan;
- j. penetapan. penerbitan. dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Surabaya Rungkut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dan memiliki tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Dalam proses bisnisnya, tugas dan fungsi tersebut diturunkan langsung kepada masing-masing seksi dan kelompok jabatan fungsional, antara lain:

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian. keuangan. tata usaha. rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan

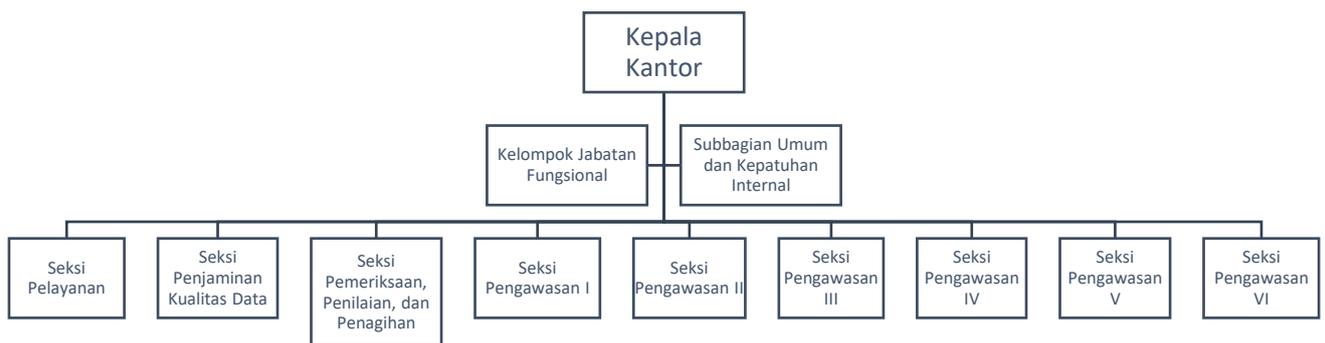
- manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
  - 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
  - 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan; pelaksanaan penilaian property, bisnis, dan asset tak berwujud; pelaksanaan tindakan penagihan; penundaan dan angsuran tunggakan pajak; serta melakukan penatausahaan piutang pajak; dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
  - 5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut

data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 3 kelompok yakni Kelompok jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Jabatan Fungsional Penilai (appraisal) dan Jabatan Fungsional Penyuluh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut sebagai berikut:

Gambar 1  
Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Rungkut



Sumber : Data Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

## F. Komposisi Wajib Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memotong, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan dan kepuasan atas terpenuhinya hak Wajib Pajak sangat berpengaruh pada tingkat optimalisasi

penerimaan pajak. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut sampai tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 110.414 Wajib Pajak.

Tabel 4  
Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Jenis Wajib Pajak	Status Wajib Pajak			
	PL/DE	Non Efektif	Normal	Total
Badan	1.498	4.696	6.946	<b>13.140</b>
Op Karyawan	40	41.687	31.251	<b>72.978</b>
Op Non Karyawan	19	15.502	8.738	<b>24.259</b>
Pemungut	24	0	13	<b>37</b>
<b>Total</b>	<b>1.581</b>	<b>63.466</b>	<b>46.948</b>	<b>110.414</b>

Sumber : Data Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 4 menunjukkan jumlah Wajib Pajak terdaftar berdasarkan jenis dan status. Dari tabel tersebut, jumlah Wajib Pajak yang paling banyak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dan Non Karyawan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut terbagi menjadi beberapa sektor.

Tabel 5  
Sektor Usaha di KPP Pratama Surabaya Rungkut

No	Uraian Sektor	Jumlah WP	Komposisi
1	Z-Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	72.980	66,1%
2	G-Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	18.516	16,8%
3	S-Kegiatan Jasa Lainnya	4.461	4,0%
4	C-Industri Pengolahan	2.072	1,9%
5	F-Konstruksi	1.848	1,7%
6	Sektor Lainnya	10.537	9,5%
<b>Total</b>		<b>110.414</b>	<b>100,0%</b>

Sumber : Data Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 5 menunjukkan sektor dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Di nomor satu, ada sektor Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja dengan komposisi sebesar 66,1%. Pada urutan kedua, ada sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil

Dan Sepeda Motor sebesar 16,8%. Sektor ini juga merupakan penyumbang penerimaan dominan di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

### G. Capaian Penerimaan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa lebih dari 80% pendapatan negara bersumber dari sektor pajak. Dalam memenuhi dan menghimpun penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target rencana penerimaan setiap tahunnya yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. KPP Pratama Surabaya Rungkut sebagai bagian dari DJP, juga turut mengampu tugas untuk mengamankan penerimaan negara.

Tabel 6  
Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut

Penerimaan	Realisasi		
	2022	2023	2024
Target	1.000.155.767.000	1.083.263.088.000	1.394.275.196.000
Bruto	1.210.934.290.398	1.231.790.815.909	1.492.567.348.419
Netto	1.168.169.721.213	1.172.718.647.847	1.398.182.449.796
Capaian	116,80%	108,26%	100,28%

Sumber : Data Apportal DJP

Tabel 6 menunjukkan target beserta realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam tiga tahun terakhir. Dilihat berdasarkan data, KPP Pratama Surabaya Rungkut berhasil memenuhi target penerimaan melebihi 100%.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses organisasi yang bertujuan memutuskan arah organisasi dalam suatu jangka waktu tertentu, dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi, serta alokasi sumber daya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Di dalam perencanaan strategis, diperlukan adanya pengukuran kinerja instansi yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan agar berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

##### **1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024, yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran strategis tersebut antara lain:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

## 2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran. Di tahun 2024, program yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan informasi yang berkualitas;
- i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
- j. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

### B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penetapan kinerja, ditetapkan pula sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, serta target indikator kinerja.

Sasaran program/kegiatan merupakan pernyataan tentang yang ingin dicapai (output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan (proses) atau apa yang seharusnya kita miliki (input).

Indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian sasaran strategis yang memenuhi kriteria SMART-C, yaitu:

- a. *Spesific* (spesifik)
- b. *Measureable* (terukur)
- c. *Achievable* (dapat dicapai)
- d. *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi)
- e. *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian)
- f. *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi)

Untuk mengetahui pencapaian sasaran perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka

sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120

## BAB III

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Surabaya Rungkut tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024. NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	103,82
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,82
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,28%	Max	E/L	26%	57,78%	100,28
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,66	Max	P/L	19%	42,22%	108,66
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,77
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,30%	Max	E/L	26%	57,78%	100,30
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,26%	Max	P/L	19%	42,22%	113,26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,18
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,18%	Max	E/M	21%	100,00%	100,18
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,45
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,30
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,60%	Max	E/M	21%	50,00%	110,60
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,58
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,73%	Max	P/M	14%	33,33%	118,73
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,11
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,82%	Max	P/M	14%	26,92%	117,82
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,26%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19%	57,58%	111,82
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	115,70
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,39
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,33	Max	P/M	14%	33,33%	117,33
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,77	Max	P/M	14%	33,33%	109,14
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,93	Max	P/M	14%	33,33%	107,70
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,78</b>

Dilihat secara garis besar dari tabel diatas, KPP Pratama Surabaya Rungkut berhasil mencapai seluruh program dan sasaran yang ada dengan nilai  $\geq 100\%$  dengan capaian NKO sebesar 109,78%. Rincian capaian beserta penghitungan realiasi seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dijelaskan pada tabel berikut:

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU		Target		Realisasi	
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	x 100%	100,00%	1.394.275.196.000	100,28%	1.398.182.449.796
		Target penerimaan pajak					1.394.275.196.000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100,00	(50% x 100) + (50% x 100) = 100,00	108,66	(50% x 117,31) + (50% x 100) = 108,66
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	1.188.156.614.000	100,30%	1.191.691.181.195
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM					1.188.156.614.000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	(1,2 x Jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang Laporan Tepat Waktu) + (Jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 selain yang Laporan Tepat Waktu)	x 100%	100,00%	38.468	113,26%	(1,2 x 30.652) + 6.788
		Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023					38.468
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	206.118.582.000	100,18%	206.491.268.601
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM					206.118.582.000
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		74,00	74,00	120,00%	88,80
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		100,00%	100%	110,60%	110,60%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan))		90,00%	(50% x 100) + (50% x 100) = 100%	120,00%	(50% x 117,60%) + (50% x 120%) = 118,80%

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU		Target		Realisasi	
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100,00%	$(50\% \times 100) + (50\% \times 100) = 100\%$	120,00%	$(50\% \times 120\%) + (50\% \times 120\%) = 120\%$
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)	x 100%	100,00%	100% + 100%	120,00%	120% + 120%
		2			2		2
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100,00%	$(30\% \times 100\%) + (40\% \times 100\%) + (30\% \times 100\%) = 100\%$	120,00%	$(30\% \times 120\%) + (40\% \times 120\%) + (30\% \times 120\%) = 120\%$
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)		100,00%	$(100\% \times 60\%) + (100\% \times 40\%) = 100\%$	117,82%	$(120\% \times 60\%) + (114,55\% \times 40\%) = 117,82\%$
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$		75,00%	75,00%	120,00%	$(50\% \times 114,08\%) + (20\% \times 100\%) + (30\% \times 125,42\%) = 114,67\%$
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%	100%	100,00%	100%
		Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah					
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Presentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Presentase penyediaan data potensi perpajakan)	x 100%	100,00%	100% + 100%	120,00%	120% + 120%
		2			2		2

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU	Target		Realisasi																
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak															
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$\left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$ $+$ $\left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$	55,00%	55%	111,82%	61,50%															
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100,00	100,00	117,33	117,33															
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85,00	85,00	109,14	92,77															
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90,00	90,00	107,70	96,93															
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)	100,00	100,00	120,00	$(50\% \times 97,71) + (50\% \times 100) = 98,86$ <p>Konversi Indeks = 120</p>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Tw IV</th> <th>Formula Konversi Tw IV</th> <th>Kriteria Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>120</td> <td>Realisasi IKKPA &gt; 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 &lt; X &lt; 120</td> <td><math>100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}</math></td> <td>(91,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 95,00)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>Realisasi IKKPA = 91,00</td> </tr> <tr> <td>80 &lt; X &lt; 100</td> <td><math>80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{**}</math></td> <td>(80,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 91,00)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>Realisasi IKKPA = 80,00</td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKKPA &lt; 80,00</td> </tr> </tbody> </table>					Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{**}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																			
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																			
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)																			
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																			
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{**}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)																			
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																			
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																			

## **B. Evaluasi Kinerja Organisasi**

### **1. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak**

Pencapaian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2024 telah tercapai Rp 1.398.182.449.796 atau 100,28% dari target sebesar 1.394.275.196.000. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai IKU ini antara lain:

- a. Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak
- b. Melakukan pengawasan atas pembayaran setoran Wajib Pajak
- c. Memanfaatkan data potensi perpajakan yang ada secara maksimal.

### **2. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Pencapaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2024 telah tercapai 108,6%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai IKU ini antara lain:

- a. Melakukan monitoring bulanan terhadap penerimaan, dan menginformasikan apabila terdapat penerimaan maupun restitusi yang cukup besar
- b. Melakukan koordinasi terkait pembayaran yang tidak rutin, dan menghubungi Wajib Pajak melalui Account Representative untuk memastikan pembayaran pajak

### **3. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Pencapaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah mencapai tercapai sebesar 100,30% dari target senilai Rp 1.188.156.614.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.191.691.181.195. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai IKU ini antara lain:

- a. Monitoring terhadap pembayaran PPh Pasal 25
- b. Mengirimkan himbuan terhadap Wajib Pajak yang belum membayarkan angsuran PPh Pasal 25
- c. Menerbitkan STP tahun berjalan
- d. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan
- e. Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

**4. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Pencapaian realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2024 telah tercapai 113,26% atau sebesar 43.570,4 dari target 38.468. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai IKU ini antara lain:

- a. Menerbitkan surat imbauan pelaporan SPT Tahunan
- b. Mengundang WP untuk mengikuti kelas pajak terkait dengan pelaporan SPT
- c. Melakukan *Whatsapp Blast* kepada seluruh wajib pajak dan mengajak Wajib Pajak untuk lapor SPT melalui media sosial KPP Pratama Surabaya Rungkut
- d. Menambah loket dan petugas penerimaan SPT dan membuat Satuan Tugas (Satgas) SPT Tahunan.

**5. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

Pencapaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah mencapai tercapai sebesar 100,18% dari target senilai Rp 206.118.582.000 dengan realisasi sebesar Rp 206.491.268.601. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai IKU ini antara lain:

- a. Menyusun dan menetapkan DPP, DSPP, DSPT, dan DSPE
- b. Menindaklanjuti Daftar DPP yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan dengan proses penelitian dan Penerbitan LHPT, SP2DK sampai LHP2DK
- c. Menerbitkan STP selain tahun pajak berjalan atas dafnom yang ada di aplikasi
- d. Melakukan Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut DPP, DSPP, DSPT dan DSPE
- e. Melakukan tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak WP besar strategis untuk mendukung pencairan PKM Penagihan.

**6. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tercapai dengan realisasi 120% dengan nilai 88,80 dari target 74,00. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Memanfaatkan momen dan tanggal edukasi yang berpotensi membuat Wajib Pajak melakukan perubahan perilaku
- b. Optimalisasi teknologi, data CRM dan informasi untuk kegiatan Edukasi Tema III agar dapat menjangkau lebih banyak peserta edukasi secara optimal dan efisien
- c. Kegiatan edukasi memecah profil Wajib Pajak, dari yang berpotensi nihil atau kurang bayar dan menyesuaikan penyampaian dan tindaklanjut perubahan perilakunya
- d. Menyediakan kanal tindaklanjut pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 nihil bagi Wajib Pajak yang terhalang penggunaan aplikasi e-SPT.

**7. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tercapai dengan realisasi 110,60%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Optimalisasi teknologi, data dan informasi untuk kegiatan Edukasi agar dapat menjangkau lebih banyak peserta edukasi secara efisien
- b. Mengelola umpan balik atas kegiatan edukasi untuk bahan perbaikan ke depan
- c. Koordinasi harian antar Taxmin dan Pengelola Medsos menanggapi kampanye pusat
- d. Memberikan informasi terkini dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Saluran Telegram yang dibuat khusus untuk Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut.

**8. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tercapai 118,80% dari target 90% dengan nilai realisasi 120%. Rincian capaian Kegiatan Pengawasan pembayaran Masa (PPM) adalah Realisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa WP Strategis sebesar 117,60% dan WP Wilayah sebesar 120%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melakukan penerbitan STP
- b. Menindaklanjuti data tahun berjalan
- c. Menindaklanjuti data DPE maupun non DPE untuk diterbitkan NPWP
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

**9. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai dengan nilai realisasi 120%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Menerbitkan LHPT/SP2DK atas DPP yang mempunyai data dukung yang sudah valid
- b. Menerbitkan undangan pembahasan terhadap WP yang belum merespon SP2DK dan melakukan visit lokasi WP
- c. Melakukan analisa mandiri terhadap WP yang tidak memiliki data dukung yang cukup berdasarkan data internal/eksternal lainnya.

**10. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai dengan nilai realisasi 118,73%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Menerbitkan STP atas data-data sebelum tahun berjalan
- b. Memanfaatkan data tahun sebelum tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.

**11. 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai dengan nilai realisasi 120%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Berkoordinasi antar seksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
- b. Mengirimkan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu
- c. Melakukan monitoring pemenuhan target setiap triwulan.

**12. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai dengan nilai capaian 117,82%. Capaian tersebut terdiri dari realiasi efektifitas pemeriksaan sebesar 120% dan realisasi efektifitas penilaian sebesar 114,55%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melakukan Pembahasan DSP4 atas DSPP dan DSPPn Rekomendasi
- b. Mengusulkan DSP4 atas DSPP dan DSPPn Kolaboratif ke Kanwil
- c. Melakukan pembahasan atas usulan DSPP RBP dari Seksi Pengawasan

- d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap WP besar sektor unggulan (emas) untuk mendukung pencairan PKM Pemeriksaan
- e. Melaksanakan konseling terhadap WP yang setuju atas hasil pemeriksaan untuk melakukan pembayaran
- f. Melaksanakan kegiatan penilaian.

### **13. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan**

IKU Tingkat efektivitas penagihan tercapai dengan nilai capaian 120%. Kegiatan yang dilakukan sepanjang Tahun 2024 antara lain Penerbitan Surat teguran sebanyak 5.371 surat, Surat Paksa sebanyak 8.619 surat, Pelaksanaan sita sebanyak 85, Blokir sebanyak 131, dan Penjualan barang sitaan sebanyak 63 barang sitaan. Tindak lanjut DSPC tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target dengan pencairan sebesar 125,42%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melakukan Pembahasan DSP4 atas DSPC Rekomendasi
- b. Melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan dan Penjualan Barang Sitaan berupa Pemindahbukuan, Melaksanakan lelang.
- c. Melakukan tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak WP besar strategis untuk mendukung pencairan PKM Penagihan
- d. Melaksanakan kegiatan Blokir dan Lelang Serentak
- e. Melaksanakan Asset Tracing
- f. Melaksanakan tindakan penagihan sampai dengan penyitaan atas Piutang Pajak Macet dan Mendekati Daluwarsa.

### **14. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercapai dengan nilai capaian 100%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melakukan Inventaris dan pemilihan wajib pajak yang memiliki indikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
- b. Mengusulkan wajib pajak yang terindikasi melakukan Tindak Pidana di bidang perpajakan untuk dilakukan BUPER ke Kanwil
- c. Melengkapi data dan informasi/bukti atas wajib pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

**15. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah tercapai dengan capaian 120%. Realisasi KPDL SE-11 sebanyak 1.565 Alket dari target 1.108 (tercapai 120%). Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melakukan produksi data melalui kegiatan KPDL
- b. Melakukan monitoring penyelesaian validasi secara berkala
- c. Melakuklan perekaman dan approval Alket tepat waktu.

**16. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai dengan capaian 111,82%. Target yang diberikan selama tahun 2024 adalah 55,00 dengan realisasi 61,50. Koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I diperlukan dalam rangka pencapaian target ini dikarenakan Tingkat pengendalian dan penyelesaian berada di Kantor Wilayah.

**17. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tercapai dengan realisasi 117,33%. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Monitoring pegawai yang belum menyelesaikan jamlat SIKKA
- b. Melaksanakan kelas pajak untuk pegawai yang akan mengikuti ujian
- c. Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM sebanyak 4 bidang tiap triwulan
- d. Melaksanakan IHT perpajakan (KUP, PPh, PPN, Data) secara berkala.

**18. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tercapai dengan capaian 109,14% dengan target 85,00 dan realisasi 92,77. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melaksanakan budaya pelayanan prima dan iht commucation skill
- b. Melaksanakan IHT/pelatihan tentang budaya pelayanan prima dan komunikasi yang optimal secara berkala
- c. melaksanakan briefing secara rutin kepada petugas *frontliner* dan pegawai *back office*

### **19. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tercapai dengan capaian 107,70% dengan target 90,00 dan realisasi 96,63. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Melakukan Kegiatan Imbauan Kinerja minimal satu kali setiap triwulan. Imbauan Kinerja dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Menyampaikan Laporan Imbauan Kinerja tepat waktu
- c. Melengkapi dokumen yang diperlukan terkait Laporan Imbauan Kinerja
- d. Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko dan rapat DKRO tiap triwulan tepat waktu

### **20. 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai dengan capaian 120%. Capaian tersebut terdiri dari realisasi Nilai IKPA sebesar 97,71 dan Nilai Monitoring dan Evaluasi Kemenkeu/SMART sebesar 100,00. Beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam rangka mencapai target IKU ini antara lain:

- a. Memeriksa kesesuaian data pada Surat Perintah Bayar (SPBy) dengan bukti pendukung yang dilampirkan
- b. Memverifikasi kebenaran dokumen tagihan yang diajukan PPK melalui Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas tagihan melalui mekanisme UP
- d. Menginput data kuitansi pada aplikasi SAKTI dan melakukan rekonsiliasi manual atas kuitansi tersebut untuk memastikan saldo telah sesuai
- e. Membuat register penutupan kas
- f. Menatausahakan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya
- g. Membuat pembukuan bendahara, Menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara
- h. Melakukan pelaporan SPT Masa
- i. Melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak dari pihak ketiga selaku pemotong/pemungut pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Melakukan distribusi bukti potong

- k. Melakukan Penggantian (*Revolving*) UP tepat waktu minimal satu kali tiap bulan dalam melakukan Penggantian UP
- l. Menyelesaikan Pertanggungjawaban TUP atau PTUP secara tepat waktu dalam jangka waktu 1 bulan/30 hari
- m. Membuat DRPP untuk pengajuan GUP
- n. Membuat SPP GUP atas dasar DRPP
- o. Menyelesaikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban SPD Pindah secara Tepat Waktu.

### C. Realisasi Penerimaan

Analisis terhadap pencapaian sasaran yang diharapkan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut menyimpulkan bahwa target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 sudah terpenuhi. dari indikator rencana penerimaan sebesar Rp 1.394.275.196.000,00 dapat tercapai sebesar Rp 1.398.182.449.796,00 atau 100.28% dari rencana penerimaan Tahun 2024. Komposisi realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022. 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2022 (dalam rupiah)

JENIS PAJAK	Target	Bruto	Netto	Capaian
A. Pajak Penghasilan	708.202.949.000	701.902.085.230	694.959.729.475	98,13%
1. PPh NON MIGAS	708.202.949.000	701.903.360.168	694.961.004.413	
2. PPh MIGAS	-	1.274.938	1.274.938	
B. PPN dan PPhBM	291.882.362.000	502.705.194.262	466.882.980.832	159,96%
C. PBB dan BPHTB	-	21.303.675	21.303.675	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	5.249.451.472	5.249.451.472	-
E. Pajak Lainnya	70.456.000	1.056.255.759	1.056.255.759	1499,17%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.000.155.767.000</b>	<b>1.210.934.290.398</b>	<b>1.168.169.721.213</b>	<b>116,80%</b>

#### Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2023 (dalam rupiah)

JENIS PAJAK	Target	Bruto	Netto	Capaian
A. Pajak Penghasilan	560.676.166.000	601.167.625.597	595.628.192.613	106,23%
1. PPh NON MIGAS	560.676.166.000	601.167.748.376	595.628.315.392	
2. PPh MIGAS	-	122.779	122.779	
B. PPN dan PPhBM	522.586.592.000	628.690.622.051	575.157.886.973	110,06%
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	1.932.262.261	1.932.262.261	-
E. Pajak Lainnya	330.000	306.000	306.000	92,73%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.083.263.088.000</b>	<b>1.231.790.815.909</b>	<b>1.172.718.647.847</b>	<b>108,26%</b>

**Realisasi Penerimaan Pajak  
Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)**

JENIS PAJAK	Target	Bruto	Netto	Capaian
A. Pajak Penghasilan	769.599.910.000	800.406.765.776	785.573.034.075	102,08%
1. PPh NON MIGAS	769.599.910.000	800.408.347.026	785.574.615.325	
2. PPh MIGAS	-	1.581.250	1.581.250	
B. PPN dan PPhBM	624.188.251.000	691.649.535.275	612.098.368.353	98,06%
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	314.900	314.900	-
E. Pajak Lainnya	487.035.000	511.362.268	511.362.268	104,99%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.394.275.196.000</b>	<b>1.492.567.348.419</b>	<b>1.398.182.449.796</b>	<b>100,28%</b>

**D. Realisasi Anggaran**

Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024  
(dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	886.894.000	882.465.000	99,50%
2.	Belanja Barang	3.998.494.000	3.812.505.248	95,35%
3.	Belanja Modal	0	0	00,00%
Jumlah		4.885.388.000	4.694.970.248	96,10%

**Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023  
(dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	883.741.000	825.236.000	93,38%
2.	Belanja Barang	3.539.067.000	3.431.775.001	96,97%
3.	Belanja Modal	253.000.000	252.440.640	99,78%
Jumlah		4.675.808.000	4.509.451.641	96,44%

**Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022  
(dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	5.180.408.000	4.938.263.693	95,33%
2.	Belanja Barang	3.458.596.000	3.200.563.921	92,54%
3.	Belanja Modal	82.153.000	82.153.000	100,00%
Jumlah		8.721.157.000	8.220.980.614	94,26%

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.694.970.248,00 atau 96,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.

### **Bagian Anggaran 999**

#### **1.1. Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut**

Tidak terdapat pendapatan pada BA 999 satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut pada Tahun Anggaran 2024.

#### **1.2. Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut**

Tidak terdapat belanja pada BA 999 satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut pada Tahun Anggaran 2024.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Surabaya Rungkut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal.

Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut tahun 2024 secara umum sudah memenuhi seluruh target/sasaran dengan capaian akhir sebesar 109,78%. KPP Pratama Surabaya Rungkut juga telah berhasil memenuhi Sasaran Penerimaan tahun 2024 sebesar Rp 1.398.182.449.796,00 atau 100.28% dari target.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak terkait serta menjadi acuan demi mencapai target yang lebih baik lagi di Tahun 2025. Perbaikan sangat diperlukan dan diharapkan demi bisa mengoptimalkan penerimaan serta pencapaian target di tahun mendatang.